



Buletin Parlementaria



Maksimalkan
Bantuan Untuk
Korban Erupsi



Pimpin Pertemuan
Bahas Upah
Pasca - Putusan MK

Sidak Rutan, DPR Akan Bentuk Panja Pemasyarakatan



Nomor 1320/I/XII/2024 Desember 2024



9 772614 339005



Sidak Rutan, DPR Akan Bentuk Panja Pemasarakatan



FOTO: OJI/AHA

Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya dan Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara saat beserta tim saat melakukan sidak ke Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11/2024).

Komisi XIII DPR RI akan segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pemasarakatan atas kasus kaburnya Tujuh tahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Salemba. Panja Pemasarakatan ini dibentuk untuk dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan.

“Kita akan membentuk panja untuk kemudian reformasi pemasarakatan ini menjadi spirit kami di Komisi XIII dan Kementerian Impas (Imigrasi dan Pemasarakatan). Dan ini juga menjadi pesan Pak Presiden, hukum jangan hanya tumpul ke atas tajam ke bawah, tapi ke semua,” tegas Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya

saat melakukan sidak di Rutan Kelas I Salemba, Jakarta Pusat, Kamis (14/11).

Dalam sidak tersebut, Komisi XIII DPR RI juga melakukan pengecekan dan menemukan sejumlah CCTV tidak aktif termasuk di lokasi tempat tahanan kabur. “Habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif apalagi yang di belakang, tempat cabut (kabur), jadi loncat itu terus di sana *blank spot*,” jelasnya.

Selain itu, Komisi XIII juga mengumpulkan materi bahan untuk Panja Pemasarakatan seperti rekaman CCTV selama satu minggu, petugas piket sel tahanan selama seminggu, hingga perihal cuti pegawai Rutan. “Siapa yang piket hari itu dan

yang piket seminggu sebelumnya? nanti kita juga minta alasan cutinya, kapan mengajukan cutinya? ini materi-materi pendalaman yang nanti akan spiritnya kita akan membentuk Panja,” tuturnya.

Setelah melakukan pengumpulan materi melalui sidak ini, Komisi XIII DPR RI akan melakukan Rapat Pimpinan pada hari Senin. “Hari Senin akan ada rapim nanti habis rapim kita kumpulkan untuk kemudian kita bentuk Panja Pemasarakatan. Mungkin *kick off*-nya akan lebih efektif untuk masa sidang berikutnya tapi sekarang kita mau memanggil beberapa pihak yang cukup berkompeten untuk mendapatkan *input*,” pungkasnya. gal/aha



Maksimalkan Bantuan Untuk Korban Erupsi



FOTO: ENO/AHA

Ketua DPR RI Puan Maharani.

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah untuk fokus meneruskan proses evakuasi dan penyelamatan warga korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Puan berharap proses evakuasi dapat dilaksanakan dengan maksimal.

“Saya mengucapkan turut berdukacita bagi para korban bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di NTT, serta keprihatinan bagi semua warga yang terdampak. Kami meminta Pemerintah untuk fokus dalam upaya evakuasi dan penyelamatan para korban serta memastikan kebutuhan dasar mereka tercukupi,” kata Puan

Maharani dalam keterangan persnya, Rabu (13/11).

“Dalam proses evakuasi, kerahkan semua sumber daya termasuk tim SAR di sekitar lokasi,” lanjutnya. Ia juga meminta Pemerintah untuk memastikan kebutuhan dasar korban pengungsian terustersedia. Seperti air bersih, tempat tidur, makanan, minuman obat-obatan, hingga kebutuhan bagi lansia dan anak-anak, serta ibu hamil dan menyusui.

“Mengingat medan susah, Pemerintah perlu menggunakan berbagai sarana untuk evakuasi dan menyalurkan bantuan, termasuk memaksimalkan kapal-kapal TNI,” ucap Puan. **aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Biro Pemberitaan Parlemen



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

WAKIL PENGARAH

Suprihartini S.I.P., M.Si (Deputi Bidang Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si. (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

M. Ibrurkhalid, S.Pd. (Kabag Media Cetak)

WAKIL PIMPINAN REDAKSI

Rizka Arinindyia, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P. (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR

Agung Hidayat, S.I.P. Ridwan Budiman, S.I.P. Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI

Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md.
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI

Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askarnal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nachden Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullu, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnaricha Firsta Dysie, Baggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien, Yasmin Nabila

FOTOGRAFER

Naefuroji, Jaka Nugraha, Ruri Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen, Moh Farhan Nur Fikri

INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, S.T. (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E. (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrezi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E.
Indah Ekawati, S.I.Kom.

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

M. Chaiudin, S.Sos. M.M. (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Zulfikar, S.A.B.

ADMINISTRASI

STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697

Email : bag_penerbitan@ DPR.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK
PERMINTAAN HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

Pimpin Pertemuan Bahas Upah Pasca-Putusan MK



FOTO: DOK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (KORPOLKAM), Sufmi Dasco Ahmad.

Wa kil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal, Menteri Hukum Supratman Andi Angtas, dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. Pertemuan tersebut dalam rangka untuk membahas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 yang kini sudah tidak berlaku. Menindaklanjuti Putusan MK tersebut, ia sepakat untuk melakukan kajian menyeluruh guna menentukan sistem upah buruh yang seimbang bagi pengusaha dan pekerja.

“Sudah disepakati bahwa buruh,

pemerintah, dan DPR akan membahas secara mendalam bagaimana menetapkan indeks upah buruh agar tidak merugikan kedua belah pihak, baik pengusaha maupun buruh,” terang Dasco melalui rilis yang diterima **Parlementaria** di Jakarta, Rabu (6/11).

Politisi Fraksi Partai Gerindra itu menjelaskan bahwa kebijakan upah minimum akan dibahas dengan teliti sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan maksimal dua tahun sejak putusan MK dibacakan. Dirinya pun menegaskan bahwa DPR dan pemerintah berjanji akan melakukan koordinasi intensif untuk segera menetapkan kebijakan yang lebih baik dalam penetapan upah minimum

tanpa terburu-buru, namun tetap berpihak pada kesejahteraan buruh.

“Kami optimistis proses ini bisa selesai dalam waktu yang tidak terlalu lama, namun tetap memerlukan waktu karena ini bukan hal yang mudah dan tidak harus terburu-buru,” imbuhnya.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan apresiasinya kepada Wakil Ketua DPR yang telah mempertemukan perwakilan serikat buruh dengan Menteri Hukum dan HAM serta Menteri Ketenagakerjaan. Iqbal menjelaskan bahwa upah minimum harus ditetapkan sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2025, sesuai aturan sebelumnya. **um/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Dukung Implementasi Satu Data BPS



FOTO: DOK/PDT

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (KORKESRA), Cucun Ahmad Syamsurijal

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan pentingnya penerapan satu data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai upaya mendukung keberhasilan program-program pemerintah. Menurutnya, dengan adanya Satyang terintegrasi, pelaksanaan program pemerintah dapat berjalan lebih presisi dan tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Cucun saat menggelar pertemuan dengan BPS Provinsi Sumatera Utara dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera

Utara di Medan, Jumat (15/11). Pertemuan tersebut membahas peran data yang akurat dan terintegrasi dalam mendukung berbagai sektor pembangunan, termasuk penanggulangan bencana di daerah.

“Satu Data ini bukan hanya tentang angka-angka, tetapi bagaimana kita memanfaatkan data sebagai fondasi kebijakan yang tepat sasaran. Dengan data yang presisi, pemerintah bisa merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.

Pimpinan DPR Bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi

antara lembaga pemerintah, untuk memastikan sinkronisasi data. Menurutnya, data yang valid dan terintegrasi dapat menjadi pedoman dalam menghadapi tantangan nasional, seperti penanggulangan bencana, perencanaan pembangunan, dan evaluasi program pemerintah.

Cucun menambahkan, kebijakan satu data dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebagai wakil rakyat, ia berkomitmen untuk terus mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif guna memastikan data yang disajikan oleh BPS benar-benar digunakan sebagai dasar perumusan kebijakan publik. [skr/rdn](#)

Scan QR untuk berita selengkapnya





FOTO: OJI/PDT

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG), Saan Mustopa.

Berikan Perhatian Peternak Sapi Lokal

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyoroti aksi peternak sapi yang membuang susu di Pasuruan, Jawa Timur. Hal itu karena pembatasan jumlah pengiriman ke Industri Pengolahan Susu (IPS) dan dibukanya keran impor susu dengan sangat lebar.

Saan menegaskan pemerintah harus memberikan perhatian khusus pada peternak sapi lokal agar tak lagi membuang susu hasil panen. "Kita berharap, ya, bahwa petani-petani atau peternak-peternak lokal yang terkait dengan terutama peternak sapi untuk susu, itu juga tetap mendapatkan prioritas perhatian dari pemerintah," kata Saan kepada media, di Jakarta, Sabtu (9/11).

Ia tak menampik keperluan impor susu karena kebutuhan yang besar. Namun, menurutnya, pemerintah harus tetap memberikan perhatian khusus agar alokasi pasokan susu didominasi oleh peternak lokal.

"Jadi tetap di samping memenuhi kebutuhan susu untuk nasional, itu tetap juga harus selain impor, karena

memang tidak mencukupi, juga peternak itu harus mendapatkan perhatian khusus juga," kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu.

Dengan demikian, katanya, tak ada lagi susu dari peternak lokal yang tidak laku karena tak mampu bersaing dengan kualitas susu impor. Apabila ketersediaan susu di pasar domestik sudah tak lagi bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, kata Saan, baru lah keran impor susu bisa dibuka. "Nanti sisanya kekurangan dari lokalnya berapa, baru nanti impornya berapa. Sehingga kesediaan susu secara nasional itu bisa terpenuhi," tuturnya.

rdn



**PEMERINTAH HARUS MEMBERIKAN
PERHATIAN KHUSUS PADA PETERNAK SAPI
LOKAL AGAR TAK LAGI MEMBUANG SUSU
HASIL PANEN**

Saan Mustopa

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (KORINBANG)



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Ketahanan Siber dan Pembentukan Angkatan Ke-4 Siber



FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11/2024).

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Gubernur Lemhannas, Anggota Komisi I DPR RI, Abraham Sridjaja, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap maraknya serangan siber di Indonesia. Ia menilai pentingnya dukungan terhadap pembentukan Angkatan Ke-4 Siber sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan siber nasional.

“Saya ingin memberikan perhatian khusus karena beberapa waktu lalu Panglima TNI sempat menyatakan rencana pembentukan Angkatan Ke-4 Siber. Menurut saya, ini adalah langkah yang harus didukung bersama,

mengingat maraknya serangan siber di Indonesia. Bahkan pagi ini, ada salah satu instansi di Indonesia yang situsnya diretas dan diganti dengan konten judi online,” ujar Abraham dalam rapat kerja di Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (13/11).

Abraham menambahkan bahwa serangan siber yang semakin sering terjadi kini semakin serius dan harus segera ditangani. Ia menjelaskan bahwa baru-baru ini terdapat kasus peretasan situs salah satu instansi yang diubah menjadi situs judi online oleh peretas asal Filipina. Selain itu, ia menyoroti banyaknya kasus kebocoran data yang dijual di *dark web*. Untuk itu, politisi Fraksi Partai Golkar ini

menekankan pentingnya langkah strategis untuk menangani masalah tersebut.

“Kita perlu memiliki ketahanan siber yang kuat. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan langkah strategis, terutama dalam hal penguatan sumber daya manusia dan teknologi, guna memastikan ketahanan siber nasional. Pembentukan Angkatan Ke-4 Siber juga perlu didukung dan dipercepat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Abraham juga meminta dukungan dari Komisi I DPR untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi pembentukan Angkatan Siber serta pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di bidang ini. **we,mj/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pertanyakan Perbedaan Fungsi Wantannas dan Wankamnas



FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas, Laksdya TNI T.S.N.B. Hutabarat, di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Anggota Komisi I DPR RI, Sabam Rajagukguk, mem pert a n k a n perbedaan mendasar antara fungsi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) dengan Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas), terkait perubahan atau revitalisasi yang tengah diproses.

Hal ini disampaikan Sabam dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPR RI dengan Sekretaris Jenderal (Sesjen) Wantannas, Laksdya TNI T.S.N.B. Hutabarat, di ruang rapat Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11). Dalam rapat tersebut, Hutabarat menjelaskan bahwa pihaknya saat ini tengah menunggu persetujuan atau arahan dari Presiden terkait perubahan Wantannas menjadi Wankamnas.

“Tadi saya mendengarkan presentasi Bapak, bahwa saat ini kami hanya menunggu persetujuan atau arahan dari Presiden mengenai perubahan Wantannas menjadi Wankamnas. Bisa dijelaskan apa perbedaan mendasar dalam fungsi Wantannas setelah berubah menjadi Wankamnas?” tanya Sabam.

Meski demikian, Sabam menyatakan bahwa secara pribadi, ia akan mendukung pembentukan Wankamnas, terutama jika dilihat dari perspektif negara-negara lain yang sudah memiliki lembaga serupa.

Dalam paparannya, Hutabarat menjelaskan alasan di balik pembentukan Wankamnas di berbagai negara. Di antaranya adalah perlunya sistem pengambilan

keputusan yang cepat dan tepat dalam kondisi darurat dan situasi krisis, termasuk ancaman terhadap eksistensi negara yang sudah bersifat multidimensi. Hal ini dinilai penting untuk memastikan penanganan masalah secara komprehensif.

Hutabarat juga memaparkan beberapa peran Dewan Keamanan Nasional (Wankamnas) di berbagai negara, yang antara lain sebagai forum koordinasi tertinggi yang melibatkan presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Wankamnas bukanlah lembaga operasional, melainkan lembaga yang membantu presiden atau perdana menteri dalam pengambilan keputusan di saat darurat dan situasi krisis.

ayu/aha



Jangan Cawe-Cawe, Harus Ciptakan Pilkada yang Jujur



FOTO: NDIY/PDT

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/11/2024).

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti indeks demokrasi Indonesia yang merosot pada pemerintahan presiden sebelumnya. Menurutnya, buruknya capaian tersebut harus dijadikan pelajaran bagi pemerintahan saat ini untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut.

Karena itu, ia berharap Pemerintahan Prabowo Subianto mampu menciptakan pemerintahan yang bersih dan berdemokrasi, yang tercermin pada menciptakan Pilkada serentak 2024 betul-betul sebagai pesta demokrasi rakyat.

“Jadi, para Penjabat (Pj) kepala daerah itu (saya imbau) sudahlah

kerja dengan baik bahwa mereka ini ASN yang diatur oleh UU (soal) netralitasnya. Itu harus terjaga dengan

baik. Jangan sampai mereka jadi tim sukses. Kalau mau jadi tim sukses keluar saja dari pegawai, cari uang jadi tim sukses, itu lebih enak kan jadi lebih fair. Jadi, jangan buat pemilu yang berpura-pura, supaya pilkada besok itu dipastikan betul-betul pesta rakyat,” tegasnya kepada di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (7/11).

Komarudin pun mengatakan bahwa seluruh pihak harus mendukung pemerintahan Presiden Prabowo dengan semangat membangun demokrasi tumbuh dengan baik. Hal itu mengingat pilkada serentak yang akan dilakukan 27 November mendatang merupakan pilkada serentak pertama yang dilak-sanakan dari Sabang sampai Merauke.

Sehingga, lancarnya Pilkada serentak ini akan menjadi adalah awal dari membaiknya kekuasaan pemerintahan Prabowo. Karena itu, ia berharap tunjukkanlah pilkada yang akan datang adalah sebagai pesta demokrasi yang jujur dan adil.

— ndy/rdn



Scan QR untuk berita selengkapny



Komisi II Harap Pembangunan IKN Lebih Cepat



FOTO: WE/PDT

Tim Kunspek Komisi II DPR RI dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono, usai meninjau progres pembangunan di IKN, Jumat (8/11/2024).

Pasca dilantiknya Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) definitif pada Selasa (5/11) lalu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda berharap progres pembangunan infrastruktur di IKN bisa berjalan lebih cepat.

“Saya berharap dengan kepemimpinan yang definitif di otorita IKN, progres pembangunan infrastruktur IKN bisa berjalan dengan cepat,” kata Rifqi sapaan akrabnya, usai memimpin kunjungan spesifik di Kalimantan Timur sekaligus melihat langsung

progres pembangunan di IKN, Jumat (8/11).

Bukan tanpa alasan, hal tersebut, kata Rifqi, sesuai dengan instruksi presiden yang meminta digenjohtnya pembangunan IKN, dan harus selesai dalam tiga tahun.

“Pak Presiden Prabowo ingin tiga tahun ke depan seluruh infrastruktur selesai. Dalam pengertian fungsi legislatif, yudikatif, dan eksekutif pusat itu semuanya bisa dilaksanakan di sini, di Nusantara,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Lebih lanjut, Legislator Dapil Kalimantan Selatan I ini mengungkapkan pihaknya juga akan

mendukung penuh kinerja-kinerja yang dilakukan Kepala OIKN. “Saya men-support penuh dan Komisi II DPR RI tentu dalam tiga fungsinya pengawasan, penganggaran, dan legislasi akan memberikan dukungan yang baik,” sambungnya.

Rifqi pun mengungkapkan rasa bangganya terkait pesatnya pembangunan di IKN. “Secara subjektif sebagai putra asli Kalimantan saya tentu berharap Kalimantan mendapat kehormatan. Dan kehormatan itu harus disambut dengan cara melakukan pembangunan infrastruktur dan kawasan IKN dengan akseleratif,” pungkasnya. **we/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Tegaskan Revisi UU KUHAP Sebuah Keharusan



FOTO: DEP/PTD

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) di ruang rapat Komisi III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menegaskan revisi Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (UU KUHAP) merupakan hal yang sangat penting. Sebab, UU KUHAP di Indonesia telah berusia lebih dari 40 tahun, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan hal-hal yang sifatnya lebih kekinian.

“Serta banyak hal-hal yang mungkin belum bisa dilaksanakan sampai saat ini. Kalau nanti dilakukan perubahan semuanya bisa dilaksanakan,” jelas Endang usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR) di ruang

rapat Komisi III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).

Tidak hanya itu, lanjut Endang, sejatinya masih ada beberapa hal lain dalam UU KUHAP yang belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Salah satu yang disorotinya adalah terkait keberadaan rumah benda sitaan, yang ditindaklanjuti dengan PP No. 27 tahun 1983, dimana dalam PP tersebut diperintahkan bahwa benda sitaan harus disimpan di rumah penyimpanan benda sitaan.

Politisi dari Fraksi PAN ini pun menilai rumah penyimpanan benda sitaan itu sangat penting untuk menyimpan benda sitaan. Karena terkait dengan pembuktian pidana

itu sendiri, yakni sebagai bukti petunjuk yang harus dihadirkan di persidangan. Dengan tidak adanya rumah penyimpanan benda sitaan maka barang bukti (benda sitaan) tersebut beresiko hilang, rusak, atau berkurang.

“Tidak hanya itu, dengan belum adanya rumah penyimpanan benda sitaan (rumpasan) ini sangat rentan untuk terjadi penyalahgunaan oleh oknum aparat penegak hukum. Sejauh ini, ketika belum adanya Rumpasan, maka penyimpanan barang sitaan menjadi tanggung jawab penyidik atau penuntut yang melaksanakan penuntutan atau penyidikan,” papar Legislator asal Daerah pemilihan Kalimantan Selatan II ini. — **ayu/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pertanyakan Langkah Konkret PPAATK Berantas Judol



FOTO: MBI/PDT

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat dengan PPAATK, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Anggota Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mempertanyakan langkah konkret Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPAATK) dalam menangani praktik judi online, khususnya yang melibatkan transaksi melalui *cryptocurrency*. Menurutnya, teknologi yang semakin berkembang, seperti penggunaan *cryptocurrency*, membuat transaksi judi online semakin sulit untuk dideteksi dan diberantas.

“Terkait dengan judi online, barangkali saya belum melihat

langkah-langkah yang sangat konkret terutama dalam mengantisipasi transaksi jurnal yang melalui *cryptocurrency*. Karena sekarang sudah mengarah kepada transaksi yang lebih modern, susah dideteksi,” kata Bambang dalam Rapat Dengar Pendapat dengan PPAATK, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Lebih lanjut, Bambang juga mengkritik kurangnya tindak lanjut terhadap temuan-temuan yang disampaikan oleh PPAATK. Misalnya, terkait pernyataan PPAATK pada Juni 2024 yang menyebut sebanyak 1.000

orang di lingkungan DPR-PRD terlibat judi online dengan transaksi mencapai lebih dari 63.000 transaksi.

Untuk itu, Politisi Fraksi Partai Golkar ini meminta PPAATK untuk menyampaikan tindak lanjut dari berbagai temuan yang telah diungkap ke publik tersebut. “Saya belum lihat ada langkah dan tindak lanjutnya, termasuk juga apa yang pernah diutarakan ada sekitar 100 DCT (daftar calon tetap Anggota DPR) yang bertransaksi tidak wajar sampai 51,47 triliun sepanjang pemilu 2022-2023. Jadi ini juga perlu penjelasan lebih lanjut,” jelasnya. **— bia/aha**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Program Makan Bergizi Gratis dan Keamanan Pangan



FOTO: AFR/PDT

Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot.

Anggota Komisi IV DPR RI Adrianus Asia Sidot menyoroti pentingnya upaya pencapaian swasembada pangan pada tahun 2029. Hal itu disampaikan Adrianus dalam Rapat Kerja Komisi IV dengan Badan Pangan Nasional dan Badan Karantina di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Adrianus menyampaikan bahwa visi pemerintahan Prabowo adalah mendorong kemandirian pangan secara nasional. "Supaya Indonesia benar-benar berswasembada pangan, paling tidak pada tahun 2029. Itu yang ingin kita tuju," jelasnya.

Dalam pertemuan ini, Adrianus menjelaskan perlunya pemerintah mengoptimalkan lahan-lahan pertanian yang sudah ada, seperti di Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi, serta tidak hanya berfokus pada ekspansi sawah baru. Adrianus menekankan bahwa ekstensifikasi lahan, seperti proyek cetaksawah baru di Kalimantan Tengah dan Merauke, memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menyinggung isu diversifikasi pangan, yang dinilai menjadi aspek penting untuk kemandirian pangan. Menurutnya, penyediaan pangan nasional tidak harus dalam bentuk beras. Terlebih, tidak semua makanan

pokok masyarakat Indonesia adalah nasi

Adrianus menekankan pentingnya perlindungan hutan sagu yang menjadi sumber pangan utama bagi masyarakat setempat, terutama di daerah yang terkena dampak lingkungan seperti Timika Lebih lanjut, Adrianus menanggapi program makan siang gratis bagi anak sekolah.

"Ini penting ya. Jadi keamanan pangan ini juga kan sangat berpengaruh. Pada umumnya petani itu mengolah lahan-lahan itu kan dengan bantuan misalnya herbisida, lalu insektisida, menggunakan pupuk-pupuk kimia Kandungan bahan-bahan berbahaya, pada makanan ini kan tinggi sekali," ujarnya. **mj,hal/rdn**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Pompanisasi Bermanfaat bagi Petani Sukoharjo



FOTO: PUN/PDT

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto, beserta tim saat meninjau program pompanisasi di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024).

Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto yang akrab disapa Titiek Soeharto, memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi IV ke Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Rabu (13/11/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan program pompanisasi dalam rangka meningkatkan produktivitas lahan pertanian.

Titiek Soeharto menegaskan bahwa peningkatan produksi melalui optimalisasi lahan dan peningkatan Indeks Pertanaman Padi di lahan sawah merupakan langkah penting

menuju swasembada pangan. “Air merupakan faktor krusial dalam upaya peningkatan produksi padi. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan air yang baik melalui infrastruktur irigasi, salah satunya dengan memaksimalkan penggunaan pompa air melalui program pompanisasi,” jelas Titiek.

Dalam kunjungan tersebut, Titiek Soeharto menyatakan bahwa program pompanisasi telah memberikan manfaat signifikan bagi para petani, terutama saat musim kemarau. “Hari ini kami dari Komisi IV meninjau program pompanisasi di Sukoharjo. Berdasarkan laporan Kepala Dinas dan kelompok tani, program ini sangat

bermanfaat. Saat kemarau panjang yang biasanya hanya memungkinkan satu kali tanam, kini petani bisa melakukan dua hingga tiga kali tanam. Ini menunjukkan efektivitas program pompanisasi,” ujar Legislator Fraksi Partai Gerindra tersebut.

Titiek juga menyoroti pentingnya debit air di sungai sebagai sumber untuk pompanisasi. “Pada musim kering, jika debit air sungai mencukupi, maka air dapat dialirkan hingga ke sawah-sawah yang jauh. Ini memastikan bahwa seluruh lahan pertanian mendapatkan pasokan air yang memadai,” tambahnya.

— pun/aha



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Terima Aspirasi Masyarakat Indramayu



FOTO: ARI/ PDI

Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiudin usai menerima audiensi dengan kuasa masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak proyek pelebaran jalur Pantura di Kabupaten Indramayu, Senin (11/11/2024).

Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiudin menerima audiensi dengan kuasa masyarakat pemilik tanah yang terkena dampak proyek pelebaran jalur Pantura di Kabupaten Indramayu, tepatnya di Kecamatan Lohbener. Audiensi tersebut bertujuan untuk menindaklanjuti keluhan warga terkait pembebasan lahan yang belum dibayar oleh pihak pemerintah.

Menurut Daniel, masalah ini berawal dari aduan masyarakat setempat yang mengklaim bahwa tanah milik mereka yang terlibat dalam pelebaran jalur Pantura belum diberikan ganti rugi. Kondisi

ini menyebabkan ketidakpuasan dan keresahan di kalangan pemilik tanah, yang merasa hak-haknya belum dipenuhi oleh pemerintah.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menjelaskan, terkait permasalahan ini, dirinya berencana untuk membawa keluhan warga ke dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak-pihak terkait, terutama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang memiliki peran penting dalam proyek pelebaran jalan tersebut.

“Ya mungkin nanti akan saya bawa pada saat RDP dengan teman-teman dari Kementerian PU karena sebetulnya ini juga ada keterkaitan

juga Kementerian yang lain kan dari Kementerian ATR/BPN tapi saya juga pengen tahu dari versi Kementerian PU seperti apa? kita kan baru menerima informasi dari masyarakat dan kita juga harus tahu informasi dari Kementerian PU sebetulnya permasalahannya itu apa?” ujarnya kepada Parlemenaria usai audiensi di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Meskipun pembebasan tanah terkait proyek jalur Pantura merupakan bagian dari upaya pengembangan infrastruktur yang bertujuan untuk kemajuan dan kelancaran transportasi, ia menekankan pentingnya untuk tetap memperhatikan keadilan bagi masyarakat yang terdampak.

gal/aha

Scan QR untuk berita selengkapnya



Usul Model Transmigrasi Berbasis Keterampilan



FOTO: AFR/PDT

Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, saat mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Transmigrasi RI.

Anggota Komisi V DPR RI, Fadholi, mengusulkan agar model transmigrasi didesain dengan pendekatan berbasis kemampuan atau keterampilan. Menurutnya, model transmigrasi yang sudah ada harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan daerah yang akan dikembangkan.

Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Transmigrasi RI pada Selasa (5/11/2024), Fadholi mengungkapkan saat ini banyak orang yang memiliki keterampilan, tetapi terbatas oleh akses lahan. Oleh karena itu, ia menyarankan transmigrasi yang tidak hanya memindahkan orang, tetapi juga memastikan mereka memiliki keahlian yang bermanfaat bagi daerah yang dituju. Misalnya, pembukaan bengkel atau keahlian dalam bidang lain yang

relevan dengan kebutuhan daerah tersebut.

“Sekarang perlu ada satu model, transmigrasi yang sekarang dengan dulu mungkin beda modelnya. Sekarang ini perlu transmigrasi yang mempunyai satu skill karena kan

sekarang ini banyak sekali orang-orang yang punya *skill* tetapi lahannya terbatas,” kata Politisi Fraksi Partai NasDem itu di tengah rapat pada Selasa (5/11) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.

Sebelumnya, Menteri Transmigrasi sempat memaparkan bahwa terdapat sekitar 150 kawasan transmigrasi yang menjadi prioritas. Menurutnya apabila yang ikut dalam program transmigrasi adalah orang-orang yang memiliki keterampilan dan kemampuan maka mereka tidak akan menjadi beban namun justru bisa memberikan kontribusi langsung terhadap kemajuan daerah tersebut.

Lebih jauh, Fadholi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam merancang kebijakan transmigrasi yang tidak hanya fokus pada pemanfaatan sumber daya alam, tetapi juga memperhatikan pengembangan sumber daya manusia di wilayah transmigrasi. Ia mencontohkan, di daerah pertanian, misalnya, bisa dihadirkan tenaga ahli dalam bidang pertanian atau pupuk untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.

uc/aha



SEKARANG INI PERLU TRANSMIGRASI YANG MEMPUNYAI SATU SKILL KARENA KAN SEKARANG INI BANYAK SEKALI ORANG-ORANG YANG PUNYA SKILL TETAPI LAHANNYA TERBATAS

Fadholi

Anggota Komisi V DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Serap Aspirasi Pembaruan Regulasi Perlindungan Konsumen

Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar Hukum Perlindungan Konsumen sekaligus Guru Besar Universitas Parahyangan Prof. Dr. Bernadette Mulyati Mulyono dan Prof. Johannes Gunawan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Memimpin agenda, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini menegaskan setiap masukan dan aspirasi yang disampaikan oleh pakar tersebut terkait perubahan

Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen memainkan peran krusial lantaran memberikan wawasan yang kaya dan berimbang, baik dari sisi konsumen, pemerintah, maupun perusahaan. Harapannya, regulasi ini menjadi payung kuat yang melindungi serta memberikan kepastian hukum yang tegas kepada setiap stakeholder.

“Sejak diundangkan, UU Nomor 8 Tahun 1999 ini dinilai masih lemah dan belum mampu menyelesaikan masalah terkait perlindungan konsumen. Apalagi dengan perkembangan

globalisasi dan teknologi, kami menilai UU yang sudah *existing* ini perlu dilakukan dan masukan dari kedua pakar ini, kami sangat nantikan,” tutur Anggia saat membuka agenda.

Sebagai informasi, setelah 22 tahun dinyatakan berlaku untuk diterapkan, UU Nomor 8 Tahun 1999 dinilai memiliki kekurangan di sejumlah aspek. Di antaranya gramatika, sistematika, tanggung jawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa konsumen, dan kelembagaan.

Turut menambahkan, Pakar Hukum Perlindungan Konsumen Prof. Johannes Gunawan, menegaskan bahwa penyusunan dari perubahan Perlindungan Konsumen harus berlandaskan UUD 1945, di mana negara yang diwakili oleh pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka, sebagai salah satu pihak yang berkontribusi menyusun naskah akademik perubahan UUPK sejak 2007, dirinya mencatat perlu ada empat perubahan yang substantif.

um/rdn



Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Para Pakar Hukum Perlindungan Konsumen sekaligus Guru Besar Universitas Parahyangan Prof. Dr. Bernadette Mulyati Mulyono dan Prof. Johannes Gunawan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024).

Dorong Sabang Jadi Sentral Perdagangan



FOTO: GER/PDT

Anggota Komisi VI DPR RI Ghufran dalam agenda Rapat Dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Anggota Komisi VI DPR RI Ghufran mendukung penuh penambahan anggaran untuk Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS) tahun 2025. Walaupun begitu, dirinya mengingatkan agar dukungan ini diiringi dengan perencanaan yang matang sekaligus diiringi dengan tekad yang kuat dari para pimpinan BPKS.

Pernyataan ini disampaikan dalam agenda Rapat Dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Kepala BPKS Iskandar Zulkarnaen di Gedung Nusantara I, Senayan,

Jakarta, Rabu (6/11). Ia pun menilai pengajuan penambahan anggaran sebesar Rp75 miliar, tidak akan cukup membangun Sabang menjadi kawasan pusat perdagangan sekaligus pelabuhan yang strategis.

Sebab itu, ia mendorong adanya penambahan anggaran yang memadai dengan landasan perencanaan yang matang, baik jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. "Saya agak kecewa, kenapa ini (penambahan) angkanya hanya Rp73 miliar, kenapa nggak sekalian di atas 100 (miliar)? Saya percaya potensi Sabang itu sangat besar tapi harus didukung rencana yang jelas ke depan dan anggaran yang besar," tegas Ghufran.

Sebagai lembaga yang sudah 24 tahun berdiri, BPKS mengemban tugas untuk membangun Kawasan Sabang sebagai salah satu pintu gerbang Indonesia yang strategis untuk pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wilayah Indonesia dan negara-negara lain.

Maka dari itu, BPKS diamanatkan untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin pembangunan berkaitan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan energi, transportasi, maritim dan perikanan, pos dan telekomunikasi, perbankan, asuransi, pariwisata, dan bidang-bidang lainnya di Kawasan Sabang. **um/aha**



Scan QR
untuk berita
selengkapnya

Kualitas Standardisasi Jadi Perhatian



FOTO: BIA/PDT

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo saat mengikuti pertemuan usai meninjau industri Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11/2024).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo menekankan pentingnya peningkatan kualitas standardisasi dan sertifikasi produk di Indonesia untuk dapat bersaing lebih baik di pasar internasional. Menurutnya saat ini standar yang diterapkan di Indonesia terkesan lebih rendah dan lebih mudah didapatkan daripada standarisasi maupun sertifikasi yang ada di negara-negara lain.

“Para entrepreneur, para pedagang, para pengusaha, jika ingin untuk melakukan ekspor ke luar gitu ada standardisasi yang berlaku di

negara tujuan yang kesannya kalau misalkan standardisasi dan sertifikasi di Indonesia ini standarnya lebih

rendah lebih mudah dibanding di negara-negara lain,” kata Rahayu di sela peninjauan industri Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/11).

Untuk itu, ia mendorong peningkatan kualitas standardisasi hingga sertifikasi produk di Indonesia, salah satunya melalui peningkatan teknologi. “Tentunya Pak Prabowo juga kenapa menekankan untuk STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika) untuk edukasi, salah satunya tentunya teknologi, *engineering*, yaitu supaya kita punya produk-produk yang bisa menyamain bahkan bersaing dengan negara-negara asing,” imbuhnya.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini pun berharap standardisasi dan sertifikasi yang ada di Indonesia terus berkembang lebih baik lagi, sehingga daya saing produk-produk Indonesia di pasar global dapat meningkat. Selain itu, peningkatan standardisasi ini juga diharapkan dapat membuka peluang bagi pengusaha lokal untuk lebih mudah memasuki pasar ekspor yang lebih luas.

“Minimal (standardisasi dan sertifikasi di Indonesia) sama (dengan negara lain), kalau misalkan bisa lebih baik lagi. Jangan misalkan kita hanya mau menerima sama, karena tentunya setiap tahun kan yang namanya teknologi terus ada evolusi, terus memperbaiki, ya kita harusnya bisa lebih baik lagi,” harapnya.

— **bia/aha**



PENINGKATAN KUALITAS STANDARDISASI HINGGA SERTIFIKASI PRODUK DI INDONESIA, SALAH SATUNYA MELALUI PENINGKATAN TEKNOLOGI

Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Penyelamatan Sritex Penting untuk Industri Tekstil Nasional



FOTO: ARN/PDT

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada Parleментарia sesuai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VII ke PT Sritex, Solo, Jawa Tengah Kamis (07/11/2024).

Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) untuk mendengarkan kondisi aktual dari manajemen perusahaan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua dan Wakil Ketua Komisi VII yang bertujuan memperoleh penjelasan langsung dari pihak manajemen, terutama Direktur Utama PT Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto.

Diketahui, PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, saat ini tengah menghadapi krisis keuangan yang memicu perhatian publik dan pemerintah.

"Kami datang untuk memahami kondisi sebenarnya di Sritex. Kami

mendengarkan langsung dari pihak manajemen, termasuk Presiden Direktur yang memaparkan penjelasan terkait krisis ini. Kami berharap informasi yang diberikan manajemen akan menjadi bahan interpretasi bagi Komisi VII untuk menentukan langkah-langkah yang perlu diambil," ujar Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi VII ke PT Sritex, Solo, Jawa Tengah Kamis (7/11).

Ia menambahkan, setelah kunjungan ini, Komisi VII akan melakukan beberapa langkah sebagai tindak lanjut dengan mengadakan rapat internal untuk mengevaluasi hasil kunjungan dan menentukan apakah perlu memanggil pihak-pihak terkait lainnya.

"Kalau kita menilai perlu memanggil pihak-pihak lain itu maka kita akan panggil pihak terkait, katakanlah dalam hal ini kita akan panggil Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Bea Cukai dan mungkin pihak khusus lain yang terkait dengan permasalahan ini," tambah Politisi Fraksi PAN tersebut.

Saleh juga menekankan bahwa potensi pasar dalam negeri yang besar harus dikelola secara optimal untuk memperkuat ekonomi nasional. Dengan mengembangkan industri tekstil lokal, diharapkan ekonomi terus bergerak dalam negeri dan meningkatkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

aar/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pendamping Kemensos Harus Jaga Netralitas



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Jajaran Kementerian Sosial di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/11/2024).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengingatkan seluruh jajaran di Kementerian Sosial, termasuk para pendamping program, agar tetap menjaga netralitas, khususnya jelang Pilkada serentak di 27 November mendatang. Hal tersebut ia ungkapkan saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Jajaran Kementerian Sosial di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (12/11).

“Tidak boleh ada keberpihakan dalam menyalurkan bantuan sosial,” tegasnya. Pesan ini menjadi penting

di tengah dinamika politik, di mana netralitas para pelayan masyarakat adalah kunci menjaga kepercayaan publik.

Selain itu, satu di antara poin yang juga mendapat perhatian besar dalam raker ini adalah permintaan untuk memodifikasi program bantuan sosial. “Bantuan sosial harus diubah dari *charity base* menjadi *empowerment base*,” jelasnya. Artinya, bantuan yang selama ini bersifat cuma-cuma harus mulai berorientasi pada pemberdayaan, agar masyarakat dapat mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Digitalisasi data kesejahteraan sosial guna meningkatkan akurasi dan tepat sasaran untuk menghadapi era digital. Komisi VIII mendorong Kementerian Sosial untuk mempercepat digitalisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memastikan para pendamping sosial melek IT. “Kita perlu pendamping yang paham teknologi, supaya bantuan bisa tepat sasaran,” katanya. Validasi data yang akurat adalah langkah penting agar program bantuan tidak salah sasaran dan benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan. **ssb/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Kolaborasi KBIHU - Kemenag Kunci Sukses Penyelenggaraan Haji



FOTO: MUN/PDT

Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni dalam rapat kerja Komisi VIII dengan KBIHU di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kemenag dalam penguatan layanan pembinaan jemaah haji,” demikian disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni dalam rapat kerja Komisi VIII dengan KBIHU di ruang rapat Komisi VIII, Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/11).

Ia menegaskan pentingnya peran KBIHU dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat. Sinergi antara KBIHU dan Kementerian Agama diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji.

“Saya minta KBIHU tidak terlibat dalam penggunaan data yang tidak valid seperti sebelumnya yang ditemukan oleh pansus haji terkait pelaksanaan ibadah haji 2024. Apalagi peran KBIHU sangat penting dalam mendukung program pelaksanaan ibadah haji,” ungkap Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Ia memandang keberadaan KBIHU hal yang penting. Dengan keterbatasan anggaran dan SDM, Kemenag tidak akan bisa menyukseskan terutama dalam hal pembinaan jemaah haji. “Kami percaya pembinaan jemaah haji tanpa kehadiran KBIHU tidak akan berjalan lancar sehingga perlu kita tekankan peralihan kuota haji jemaah yang sudah meninggal pihak KBIHU tidak terlibat,” tambahnya. **tn/rdn**

Dinamika penyelenggaraan ibadah haji terus berkembang. Karena itu, Pemerintah melalui Kemenag harus berupaya agar penyelenggaraan ibadah haji semakin baik dari tahun sebelumnya. Untuk itu pentingnya kolaborasi antara Kemenag dan KBIHU dalam memberikan pelayanan ibadah haji kepada jemaah.

“Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) merupakan mitra strategis Kementerian Agama dalam bidang pembinaan kepada jemaah haji. Keberadaan KBIHU sangat membantu



SINERGI ANTARA KBIHU DAN KEMENTERIAN AGAMA DIHARAPKAN DAPAT TERUS DITINGKATKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN BAGI JEMAAH HAJI.

M. Husni

Anggota Komisi VIII DPR RI



Scan QR untuk berita selengkapnya



Pentingnya Pendidikan Penggunaan Bahan Kimia Makanan



FOTO: AZK/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin bersama Tim Kunspek Komisi IX DPR, saat meninjau Pasar Poris di Kota Tangerang, Banten, Kamis (07/11/2024).

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IX DPR RI melakukan peninjauan ke Pasar Poris, Tangerang, Banten. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin menekankan pentingnya pendidikan kepada pedagang dan juga produsen makanan tentang bahaya makanan menggunakan bahan kimia.

“Pentingnya pendidikan terhadap pedagang dan produsen pangan mengenai bahaya penggunaan bahan kimia berbahaya dalam produk makanan. Kami ingin masyarakat

dan pelaku usaha lebih sadar akan pentingnya keamanan pangan. Untuk itu, kami akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi yang lebih masif,” ucap Alifudin usai meninjau Pasar Poris, Tangerang, Banten, Kamis (7/11).

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini saat meninjau, masih terdapat bahan makanan berbahaya yang di jual oleh pedagang, ia menegaskan akan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, dan instansi terkait untuk tegas dalam

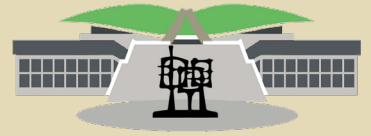
temuan ini.

“Pemerintah, terutama pihak terkait harus bertindak tegas dalam hal ini. Kami sangat prihatin dengan temuan di lapangan. Penggunaan bahan berbahaya seperti formalin dan pewarna tekstil dalam bahan pangan jelas merugikan masyarakat dan dapat membahayakan kesehatan konsumen, terutama anak-anak dan kelompok rentan lainnya,” ujar Politisi Dapil Kalimantan Barat I.

Alifudin menambahkan akan ada tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang masih menjual makanan berbahaya. **azk/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya





**Komisi V DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Tol Cipularang Km 92, Jawa Barat, Rabu (13/11/2024), menyusul kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan.
FOTO:SSB/PDT**



Scan QR untuk berita selengkapnya

